

ANTARA BALI

Membangun Karakter Masyarakat Berbasis Informasi Akurat



PEMKOT DENPASAR WADAH KREATIVITAS KAUM MUDA LEWAT PARADE BALEGANJUR

PEMKOT DENPASAR
WADAH KREATIVITAS
KAUM MUDA LEWAT PARADE BALEGANJUR



Hal. 2

DUA KESENIAN
BAULENG DITETAPKAN
SEBAGAI WARISAN
BUDAYA TAKBENDA



Hal. 12

HAL
3

Gubernur Bali Usul Pusat Reformasi OSS Agar Libatkan Daerah

Gubernur Bali Wayan Koster meminta pemerintah pusat mereformasi sistem perizinan berusaha berbasis risiko atau online single submission (OSS) RBA agar melibatkan pemerintah daerah dalam pemberian izin.

Koster dalam Rapat Koordinasi Evaluasi OSS RBA mengatakan sistem perizinan yang sepenuhnya otomatis telah menghilangkan peran pemerintah daerah, bahkan izin bagi penanaman modal asing (PMA) bisa terbit tanpa verifikasi kabupaten/kota.

"Dengan modal hanya Rp10 miliar, banyak investor asing leluasa masuk, padahal angka itu sering hanya tercatat di atas kertas, praktiknya di bawah Rp1 miliar, tapi mereka sudah men-guasai jenis-jenis usaha rakyat," kata dia di Denpasar, Jumat.

Koster mencontohkan di Kabupaten Badung, ada lebih dari 400 orang asing memiliki usaha rental kendaraan, belum termasuk usaha bahan bangunan

dan kuliner yang berdiri di lahan milik warga lokal.

"Kalau dibiarkan, pelaku luar akan membanjiri sektor ekonomi kita, ruang usaha anak-anak Bali diambil, ekonomi rakyat akan lumpuh," ujarnya.

Pemprov Bali menilai lemahnya pengawasan daerah akibat tak dilibatkan dalam OSS RBA ini berdampak langsung pada pelanggaran tata ruang.

Akar masalah OSS RBA, menurut dia, ada pada ketidakharmonisan norma antara regulasi pusat dan daerah.

"Norma yang berlaku pemerintah pusat berlaku umum, padahal di bawah ada perda RTRW dan RDTR yang seharusnya jadi acuan utama," tuturnya.



Pemprov Bali menggelar rapat yang membahas usulan pemerintah daerah membuat reformasi OSS RBA di Denpasar, Jumat (10/10/2025). ANTARA/ho-Pemprov Bali

Kewenangan kabupaten/kota terbatas, menurut dia, RDTR banyak yang belum lengkap, akibatnya, izin bisa terbit di kawasan yang seharusnya dilindungi.

Koster mengatakan norma OSS yang seragam secara nasional ini semestinya memperhatikan kondisi daerah yang padat investasi seperti Bali sehingga jangan dipukul rata dengan daerah lain.

Atas pertemuan ini dihasilkan sejumlah usulan yang akan dibawa Pemprov Bali ke DPR RI dan kementerian terkait.

Usulan tersebut, antara lain meminta sinkronisasi norma OSS dengan regulasi daerah, pengembalian kewenangan verifikasi izin kepada pemerintah daerah, klasifikasi ulang sektor usaha terutama pariwisata dan perdagangan moderen menjadi risiko menengah atau tinggi. (ant)

Pemkab Badung dan GWK Sepakati "Pinjam Pakai" di Lahan Ditembok



Gubernur Bali Wayan Koster buat kesepakatan antara pemda dan GWK pinjam pakai di atas lahan yang ditembok, Denpasar, Rabu 15/10/2025. (ANTARA/Ho-Pemprov Bali)

GUBERNUR Bali Wayan Koster mengatakan saat ini pemerintah daerah khususnya antara Pemkab Badung dan Garuda Wisnu Kencana (GWK) Cultural Park telah membuat kesepakatan "pinjam pakai" di atas lahan yang sebelumnya ditembok dan diprotes warga Desa Ungasan.

Koster dalam keterangan di Denpasar, Rabu, menyampaikan bahwa kesepakatan ini menjadi penyelesaian atas persoalan penutupan akses jalan di kawasan GWK dengan menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama.

"Yang terpenting adalah kesepahaman bersama dan

kepentingan masyarakat harus diutamakan, sangat baik apabila dibuat kesepakatan secara legal formal, hitam di atas putih, antara pemerintah dan GWK agar ada kepastian hukum," kata dia.

Menurut orang nomor satu di Pemprov Bali itu, langkah ini bukan hanya menyelesaikan persoalan akses jalan yang sebelumnya ditembok, tetapi juga memastikan bahwa hubungan antara pengelola daya tarik wisata dan masyarakat sekitar terjalin secara harmonis dan saling menghormati.

"Nanti agar disosialisasikan dan diberikan pemahaman kepada masyarakat, supaya jelas dan tuntas masalah ini," ujar Gubernur Koster.

Sementara itu, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menjelaskan telah disepakati akses jalan di sekitar kawasan GWK tetap bisa digunakan oleh masyarakat sebagaimana sebelumnya.

"Secara prinsip, pihak GWK sudah sepakat dengan apa yang kita harapkan, yaitu memberikan akses bagi masyarakat untuk tetap menggunakan jalan yang berada di kawasan GWK," kata Bupati Adi Arnawa.

Kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian pinjam pakai lahan antara pihak GWK dan Pemkab Badung.

Maka dari itu, lahan milik GWK yang selama ini difungsikan sebagai jalan umum yang sebelumnya ditembok selama setahun akan kembali bisa digunakan masyarakat selama masih diperlukan.

"Dengan adanya perjanjian pinjam pakai ini, sudah jelas bahwa apa yang menjadi keinginan masyarakat di seputaran GWK dapat terwujud, kami memastikan aspirasi masyarakat terpenuhi, dan persoalan yang berkembang selama ini dapat diselesaikan secara baik," ujarnya. (ant)

Denpasar Raih Tiga Penghargaan di Ajang Indonesia Tourism Meeting Week

Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Pariwisata mendapatkan tiga penghargaan di ajang Indonesia Tourism Meeting Week (ITMW) 2025.

Kepala Dinas Pariwisata Kota Denpasar Ni Luh Putu Riyastiti di Denpasar, Bali, Senin menyatakan penghargaan itu merupakan bukti nyata komitmen Pemerintah Kota Denpasar dalam mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan, harmonis, dan penuh makna.

Denpasar berhasil meraih tiga penghargaan sekaligus, yaitu Indonesia Prosperity City, Indonesia Green City, dan Indonesia Peace and Cultural Harmony City.

Penghargaan ini diserahkan oleh Senator DPD RI Irman Gusman, dan diterima oleh Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Denpasar Ida Ayu Dewi Citrawati.

"Penghargaan ini menjadi mo-



tivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, inovasi, serta keberlanjutan sektor pariwisata di Kota Denpasar," kata Riyas.

Riyas menjelaskan indikator penilaian tiga penghargaan ini meliputi kemampuan kota dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, mengembangkan pariwisata berwawasan lingkungan, serta menjaga kerukunan sosial dan harmoni budaya.

Penghargaan itu juga, katanya, menjadi bukti komitmen Pemerintah Kota Denpasar di bawah kepemimpinan Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara dan Wakil Wali Kota I Kadek Agus



Ilustrasi - Satu unit kereta kuda melintas di kawasan Catur Muka, Kota Denpasar, Bali. ANTARA/HO-Humas Pemkot Denpasar

Arya Wibawa dalam menghadirkan pariwisata yang berkelanjutan dan berbasis kearifan lokal. Pemerintah Kota Denpasar berharap dapat terus menunjukkan kiprahnya sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Indonesia.

Riyas juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pencapaian ini, termasuk

pelaku pariwisata, masyarakat, dan seluruh stakeholder.

"Kami berharap dapat terus bekerja sama untuk mewujudkan Denpasar sebagai kota yang Maju, kreatif, dan berbudaya," kata Riyas.

Dengan capaian ini, Denpasar semakin bersinar sebagai destinasi wisata yang berkelas dan berkelanjutan. (ant)

Pemkot Denpasar Wadahi Kreativitas Kaum Muda Lewat Parade Baleganjur



Peserta menampilkan kesenian baleganjur atau musik tradisional Bali saat pembukaan Parade Baleganjur 2025 di panggung terbuka Lapangan Puputan Badung, Denpasar, Bali, Sabtu (18/10/2025).ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo

PEMERINTAH Kota Denpasar, Bali mewadahi kreativitas kaum muda di Kota Denpasar lewat parade Baleganjur atau musik tradisional Bali.

Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Raka Purwantara di Denpasar, Rabu, mengatakan kegiatan yang merupakan rangkaian peringatan Hari Sumpah Pemuda

di Kota Denpasar ini dilaksanakan di panggung terbuka Lapangan Puputan Badung Gusti Ngurah Made Agung selama dua hari pada 18 hingga 19 Oktober 2025.

"Kegiatan parade ini diharapkan dapat mengembangkan kreativitas dan aktivitas seni kreatif inovatif di kalangan generasi muda, sebagai penerus atau

pewaris seni budaya yang tumbuh dan berkembang di zaman globalisasi ini," ujarnya.

Dia menjelaskan, di samping sebagai ajang pembinaan dan pelestarian kesenian tradisional dalam rangka mewujudkan Kota Kreatif menuju Denpasar maju, kegiatan ini juga menjadi sarana evaluasi dari semua pembinaan sekaa Baleganjur yang ada di Kota Denpasar.

Nantinya peserta menampilkan seni Baleganjur dengan tema keahlawanan/heroik (Ajeg Yowana Sebagai Tulang Punggung Pemajuan Budaya) dengan durasi waktu 8-10 menit.

"Adapun pesertanya adalah sekaa Baleganjur Sebunan tingkat desa dinas/adat dan atau/banjar se-Kota Denpasar dengan ketentuan umur peserta antara 14 – 30 tahun pada saat parade berlangsung," katanya.

Secara teknis, Kabid Kesenian Wayan Narta mengatakan jumlah peserta parade tahun 2025 ini

yakni sebanyak 12 sekaa. Beberapa unsur menjadi dasar pengamatan meliputi pada kegiatan tahun ini yakni teknik (gegedig dan teteket), serta ide dan gagasan.

Selain itu, struktur meliputi komposisi (pangawit, pangawak, pangeget), kreativitas (pengembangan musicalitas dan originalitas garapan), serta penampilan (ekspressi, gerak dan tabuh).

"Garapan Baleganjur tetap mempertahankan struktur tabuh Baleganjur tradisi yang dikembangkan (dikreasikan) dan atraksi yang disesuaikan dengan tema dan judul garapan. Sentuhan inovasi menjadi tolak ukur kreativitas, pola struktur lagu dikemas dalam satu kesatuan yang utuh tidak terpisahkan," katanya.

Nantinya, seluruh peserta akan diberikan piagam dan jasa sebesar Rp15 juta dipotong pajak dan empat peserta terbaik akan diberikan uang tambahan sebesar Rp10 juta dipotong pajak. (ant)

Pemkab Gianyar Pastikan Birokrasi Terbuka Untuk Pelayanan Publik

PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Gianyar, Bali, memastikan birokrasi yang terbuka untuk mendukung pelayanan optimal kepada publik.

"Kuncinya bukan sistem yang rumit, melainkan kebiasaan mencatat, mendokumentasikan, dan menyampaikan informasi dengan disiplin dan niat baik," kata Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Masyarakat Pemkab Gianyar I Ketut Mudana di sela sosialisasi keterbukaan informasi publik di Gianyar, Bali, Jumat.

Menurut dia, keterbukaan informasi publik (KIP) berperan menjembatani tata kelola pemerintahan untuk mendukung rakyat sejahtera.

Alasannya, kata dia, keterbukaan akan melahirkan kepercayaan masyarakat sehingga mendorong mereka ikut berpartisipasi dalam pembangunan.

Ia mendorong KIP hadir hingga pada level terbawah untuk

pelayanan publik mulai dari unit pelaksana teknis daerah (UPTD) hingga sekolah.

"Ketika sekolah terbuka soal penerimaan peserta didik dan penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS), ketika UPTD kesehatan atau pertanian terbuka soal program dan hasil kegiatan, saat itulah masyarakat melihat wujud nyata dari pemerintahan yang jujur, transparan, dan dapat dipercaya," imbuhnya.

Mudana berharap sosialisasi KIP dapat dijadikan sebagai langkah awal memperkuat budaya baru birokrasi di Kabupaten Gianyar, birokrasi yang terbuka, akuntabel, dan melayani.

"Kami yakin, dengan sinergi PPID (pejabat pengelola informasi dan dokumentasi) utama, UPTD, dan sekolah, Gianyar dapat menjadi contoh daerah yang tidak hanya maju secara teknologi informasi, tetapi juga unggul dalam transparansi dan integritas



Komisi Informasi (KI) Provinsi Bali berkolaborasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gianyar menggelar Sosialisasi Keterbukaan Informasi di Gianyar, Bali, Jumat (17/10/2025) ANTARA/HO-Pemkab Gianyar

pelayanan publik," imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Bali Dewa Nyoman Suwardana menegaskan pihaknya tidak hanya berfokus pada keterbukaan informasi publik, namun juga menangani apa bila terjadi sengketa informasi.

Pihaknya juga melaksanakan

pengawasan dan evaluasi sesuai amanat KI Pusat.

"Kami juga telah melaksanakan pengawasan dan evaluasi kepada 159 badan publik yang tersebar di seluruh Bali, dan saat ini sedang tahap pengamatan langsung dan 116 badan publik telah dikunjungi," ucapnya. (ant)

Bupati Tabanan Komitmen Wujudkan Tabanan Era Baru Bersama DPRD



Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya saat menghadiri rapat paripurna istimewa Ke-1 masa persidangan III Tahun Sidang 2025 tentang pengambilan sumpah/janji pengganti antar waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Tabanan di ruang rapat DPRD Kabupaten Tabanan, Bali, Senin (6/10/2025). ANTARA/HO-Humas Pemkab Tabanan

GEDE Sanjaya saat menghadiri rapat paripurna istimewa Ke-1 masa persidangan III Tahun Sidang 2025 tentang pengambilan sumpah/janji pengganti antar waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Tabanan di ruang rapat

DPRD Kabupaten Tabanan, Senin, menyatakan pembangunan Tabanan tidak dapat berjalan sendiri tanpa kebersamaan seluruh pihak.

Sanjaya berharap agar semangat kolaborasi Pemkab Tabanan dan DPRD yang telah terjalin

dapat terus diperkuat demi kemajuan daerah.

"Solidaritas pemerintah daerah dan DPRD yang didukung seluruh elemen masyarakat akan mampu menghadapi semua tantangan pembangunan yang semakin berat dan kompleks di masa yang akan datang," imbuhnya.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Kabupaten Tabanan I Nyoman Arnawa menjelaskan proses PAW dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan berdasarkan peraturan Nomor 12 Tahun 2018, Pasal 114 menyatakan anggota DPRD PAW, sebelum memangku jabatannya, wajib mengucapkan sumpah atau janji yang dipandu oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna istimewa.

"Pada hari yang baik ini, DPRD Kabupaten Tabanan melaksanakan PAW terhadap Saudara I Wayan Sukaja yang menggantikan

saudara I Wayan Gindera," ujar Arnawa.

Pengambilan sumpah jabatan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas keputusan Gubernur Bali Nomor 777/01-A/HK/2025 tanggal 29 Agustus 2025 tentang peresmian pengangkatan pengganti antar waktu anggota DPRD Kabupaten Tabanan.

I Wayan Sukaja dari Dapil IV (Kecamatan Kediri-Marga) Fraksi Partai Golkar, resmi menggantikan almarhum I Wayan Gindera yang sebelumnya berpulang.

Bupati Tabanan Gede Sanjaya dalam kesempatan tersebut menyampaikan ucapan selamat sekaligus pesan penting kepada anggota DPRD yang baru dilantik.

Dia berharap anggota DPRD yang baru menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja di DPRD, bekerja keras, kerja cerdas, fokus, dan kerja tulus untuk meningkatkan kinerja DPRD Kabupaten Tabanan. (ant)

Pemkab Badung Minta ASN Terapkan Nilai ASN BerAKHLAK

Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, meminta jajaran aparatus sipil negara (ASN) di daerah itu yang baru dilantik agar menerapkan nilai-nilai ASN BerAKHLAK.

"Kami berharap pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan PNS yang baru dilantik agar menerapkan nilai-nilai Core Values ASN BerAKHLAK yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif," ujar Bupati Badung Dai Arnawa saat melantik ASN di Mangupura, Kabupaten Badung, Senin.

Dalam kesempatan itu, ia memimpin pengucapan sumpah jabatan, pelantikan, dan menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan PPPK hasil seleksi pengadaan PPPK Tahap II Formasi Tahun 2024 sebanyak 1.475 Orang.

Selain itu, ia menyerahkan SK pengangkatan PNS dari lulusan Institut Pemerintahan Dalam

Negeri (IPDN) penempatan di lingkungan Pemkab Badung sebanyak dua orang.

Ia mengatakan jajaran ASN harus terus meningkatkan profesionalitas dengan meningkatkan kompetensinya sehingga harapan bisa menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan publik di Badung.

"Kami minta pelayanan publik yang diberikan juga pelayanan yang sesuai dengan ekspektasi daripada masyarakat lokal dan masyarakat internasional yang ada di Badung," ujarnya.

Ia mengatakan ASN juga harus meningkatkan integritas dan disiplin karena hal tersebut menjadi suatu dasar dalam memberikan pelayanan yang



Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa (kiri) menyerahkan SK Pengangkatan PPPK Tahap II Formasi Tahun 2024 di Balai Budaya Giri Nata Mandala, Pusper Badung, Senin (29/9/2025). ANTARA/HO-Humas Pemkab Badung

optimal.

Dia mengatakan mulai tahun 2026 semua tata kelola pemerintahan, tata kelola pelayanan publik di Badung ini berbasis teknologi informasi yang membutuhkan kesiapan adaptasi

teknologi dari seluruh ASN yang baru dilantik.

"Mudah-mudahan nanti ini bisa berjalan maksimal agar pelayanan publik di Badung semakin optimal," demikian Bupati Adi Arnawa. (adv)

Forkopimda Badung Tingkatkan Sinergi Jaga Keamanan Wilayah



Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta. ANTARA/HO-Humas Pemkab Badung

FORUM komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) Kabupaten Badung, Bali, meningkatkan sinergi dengan jajaran komponen masyarakat setempat dalam menjaga keamanan dan kondisifitas wilayah.

"Keamanan dan ketertiban penting untuk selalu dijaga di Kabupaten Badung yang merupakan destinasi wisata," ujar Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta dalam keterangannya di Mangupura, Kabupaten Badung,

Selasa.

Ia mengatakan pihaknya mengajak komponen masyarakat seperti petugas keamanan adat Bali atau Pecalang, serta aliansi dan komponen masyarakat lainnya dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pihaknya juga mengapresiasi Pasikian atau persatuan Pecalang Kabupaten Badung yang telah berhasil menciptakan situasi kondusif termasuk menjalin komunikasi dan silaturahmi dengan berbagai pihak melalui kegiatan forum tatap muka untuk memperkuat sinergitas.

"Kami mengajak semua elemen masyarakat untuk bersama-sama menciptakan suasana kondusif sehingga wisatawan yang berkunjung ke Bali khususnya ke Badung, akan merasa

nyaman dan betah," kata dia.

Kapolres Badung AKBP M. Arif Batubara mengungkapkan pihaknya terus menjalin sinergi dengan pihak-pihak terkait dalam upaya menciptakan suasana aman serta nyaman di wilayah hukum Polres Badung.

"Sebagai warga negara, kami semua memiliki hak dan kewajiban untuk menjaga ketertiban dan keamanan, sesuai dengan Pancasila," ungkap dia.

Sekretaris Pasikian Pecalang Kabupaten Badung Ida Bagus Bayu Pramana Sidhi, menjelaskan pihaknya bersama seluruh elemen masyarakat bersama Forkopimda Badung berupaya menciptakan keamanan, ketertiban, serta kondisifitas.

"Sehingga harapan kami akan dapat memberikan kedamaian dan kenyamanan bagi masyarakat," kata dia. (adv)

Wabup Badung: Program AdiCipta Implementasikan Pancasila

WAKIL Bupati Badung Bagus Alit Sucipta mengatakan program kerja AdiCipta yang dijalankan dalam pemerintahannya di bawah kepemimpinan Bupati Wayan Adi Arnawa telah mengimplementasikan Pancasila.

"Salah satu program yang telah diluncurkan yaitu pemberian bantuan Rp2 juta per KK guna mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat Badung sesuai dengan Sila Kelima," ujar Wabup Bagus Alit Sucipta saat Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Mangupura, Kabupaten Badung, Bali, Rabu.

Ia mengatakan pihaknya juga meminta masyarakat Badung untuk terus menjaga persatuan, hargai perbedaan, dan rawat nilai luhur Pancasila dalam kehidupan.

Menurut dia, peringatan tersebut menjadi momen yang lahir dari sejarah penuh pengorbanan dalam mempertahankan kedaulatan negara dan Pancasila sebagai dasar yang mempersatukan bangsa.

"Dengan begitu cita-cita Indonesia Raya yang maju, adil, dan sejahtera bukanlah mimpi belaka, melainkan tujuan yang bisa kita wujudkan bersama," kata dia.

Wabup Alit Sucipta menjelaskan peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2025 mengambil tema "Pancasila Perekat Bangsa Menuju Indonesia Raya".

Tema itu mengajak seluruh rakyat Indonesia menjaga persatuan di tengah keberagaman. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang terkandung dalam Pancasila.

"Pancasila diharapkan menjadi pegangan agar bangsa tetap kuat dan sejahtera menghadapi tantangan zaman," kata dia. **(adv)**



Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta saat peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Mangupura, Kabupaten Badung, Bali, Rabu (1/10/2025). ANTARA/HO-Humas Pemkab Badung

Pemkab Badung Bantu Ritual Agama Masyarakat Kecamatan Abiansemal



Wabup Badung Bagus Alit Sucipta. ANTARA/HO-Pemkab Badung

PEMERINTAH Kabupaten Badung, Bali, menyerahkan bantuan dana hibah Anggaran Induk Tahun 2025 sebesar

Rp1,5 miliar untuk membantu pelaksanaan ritual agama masyarakat di Pura Desa Banjar Batulumbang, Desa Adat Gerana,

Kecamatan Abiansemal.

"Ini sebagai bentuk komitmen Pemkab Badung dalam meringankan beban masyarakat yang melaksanakan Karya Ngenteg Linggih, Mupuk Pedagingan, Pedudusan Agung, Menawa ratna, Mapeselang, Mapadanan, Medasar Tawur Balik Sumpah Madia," ujar Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta dalam keterangannya di Mangupura, Senin.

Ia mengatakan pihaknya merasa senang dengan semangat gotong royong masyarakat yang dinilai sangat luar biasa.

"Kegiatan seperti ini wajib dilestarikan dengan pemerintah yang berkomitmen meringankan beban masyarakat. Ini merupakan rasa bhakti krama ke hadapan Ida Betara yang ber-

stana di Pura Desa," kata dia.

Wabup Bagus Alit Sucipta mengungkapkan pemerintah berharap upacara yang dilaksanakan oleh masyarakat berjalan dengan baik lancar, labda karya sida sidaning don, nyujur masyarakat gemah ripah loh jinawi dan masyarakat diberikan keselamatan serta, kerahayuan.

Kelian Dinas Banjar Batulumbang I Wayan Adnyana mengungkapkan masyarakat setempat berterima kasih kepada Pemkab Badung yang sudah membantu meringankan beban masyarakat.

"Untuk upacara ini tidak ada pembeli, semua swadaya masyarakat dengan dana yang dihabiskan sebesar Rp2,5 miliar," ungkap dia. **(adv)**

Bupati Badung: Festival Berbasis Komunitas Kuatkan Ekonomi Masyarakat

BUPATI Badung, Bali, I Wayan Adi Arnawa mengatakan penyelenggaraan kegiatan berbasis komunitas seperti Kuta Rock City Festival 2025 memiliki peran strategis dalam penguatan ekonomi masyarakat.

"Semakin banyak kegiatan berbasis komunitas yang diselenggarakan di Badung, maka semakin besar pula potensi perputaran ekonomi lokal, khususnya di sektor UMKM dan pariwisata," ujar Bupati Adi Arnawa dalam keterangannya di Mangupura, Senin.

Ia mengatakan Pemkab Badung mendukung perwakilan komunitas yang sudah berpartisipasi dalam membangkitkan sektor ekonomi dengan menghadirkan berbagai kegiatan, termasuk pameran UMKM lokal, musik.

Menurut dia Kuta Rock City Festival 2025 juga menjadi ajang

reuni bagi para tokoh di wilayah Kuta seperti tokoh-tokoh surfing yang menjadi embrio perkembangan pariwisata di salah satu destinasi wisata utama Pulau Dewata itu.

"Jadi kami sangat mengapresiasi kegiatan positif ini dan akan terus mendukung agar dapat berkelanjutan," kata dia.

Bupati Adi Arnawa menjelaskan pihaknya mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah karena pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat.

Pemkab Badung juga terbuka untuk menerima berbagai masukan, usulan, dan dukungan terhadap program-program yang akan dijalankan demi mewujudkan daerah agar semakin maju.

"Saya juga berharap adanya festival semacam ini, ke depan-



Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa (tengah). ANTARA/HO-Pemkab Badung

ya mampu menarik lebih banyak wisatawan, memperkuat citra Kuta sebagai destinasi pariwisata berbasis olahraga kelas dunia,

dan pada akhirnya berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah Badung," pungkas dia. (adv)

Dekranasda Badung Perkuat Pemasaran Produk Pelaku UKM



Ketua Dekranasda Badung Rasniathi Adi Arnawa (tengah).
ANTARA/HO-Pemkab Badung

DEWAN Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Badung, Bali, melakukan sejumlah upaya untuk membantu pemasaran produk-produk karya pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) setempat.

"Kami secara aktif mendorong pelaku usaha kecil dan menengah seperti di sektor kerajinan agar dapat memanfaatkan teknologi digital dalam pemasaran," ujar Ketua Dekranasda Kabupaten Badung

Rasniathi Adi Arnawa dalam keterangannya di Mangupura, Bali, Senin.

Ia mengatakan upaya lain untuk mendorong promosi dan pemasaran produk UMK Badung salah satunya adalah dengan mengikuti pameran-pameran di berbagai daerah seperti Inacraft October 2025 Vol. 4 yang telah diselenggarakan di Jakarta International Convention Center (JICC).

Menurut Rasniathi Adi Arnawa, penyelenggaraan Inacraft yang konsisten menjadi wadah promosi bagi para perajin dari seluruh Indonesia, termasuk dari Kabupaten Badung.

"Ajang ini tidak hanya memperluas jaringan pasar produk kriya, tetapi juga menjadi momentum penting untuk memperkenalkan identitas budaya Bali dan Badung di tingkat Nasional maupun Internasional," katanya.

Melalui penyelenggaraan

Inacraft, pihak-pihak terkait juga bisa melihat bagaimana kreativitas dan kearifan lokal berpadu dengan inovasi modern, katanya, menjelaskan.

Dekranasda Badung berharap ajang itu akan semakin memperluas peluang promosi dan kolaborasi, serta menumbuhkan semangat baru bagi perajin Badung untuk terus berinovasi dan melestarikan budaya daerah.

"Ini adalah ruang penting bagi perajin muda untuk terus berkarya, menjaga budaya, sekaligus beradaptasi dengan perkembangan zaman," ujar dia.

Lebih lanjut, Rasniathi Adi Arnawa mengatakan Pemerintah Badung akan terus berkomitmen untuk memperkuat ekonomi kreatif berbasis budaya lokal.

"Kami juga mendorong pelaku usaha kecil dan menengah agar dapat terus meningkatkan kualitas produk serta desainnya," ujar dia. (adv)

Pemkab Badung Mitigasi Bencana Banjir

PEMERINTAH Kabupaten Badung, Bali, melakukan sejumlah upaya mitigasi untuk mengurangi risiko bencana banjir seperti dengan melakukan normalisasi dan penggerukan sungai.

"Kami telah menginisiasi program normalisasi dan pembersihan sungai-sungai sebagai langkah mitigasi permasalahan banjir seperti yang melanda wilayah Badung beberapa waktu lalu," ujar Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa dalam keterangannya di Mangupura, Selasa.

Ia mengatakan sedimentasi dan sampah menjadi faktor penyebab bencana banjir yang terjadi di berbagai wilayah Badung akhir-akhir ini selain memang curah hujan yang tinggi.

Menurut dia berdasarkan hasil pengecekan lapangan menunjukkan faktor penyebab utama antara lain curah hujan tinggi, air laut pasang, pendekatan sungai akibat sedimentasi, serta sampah yang menumpuk

di sungai.

"Kondisi ini mengurangi kapasitas sungai yang menampung air sehingga banjir cepat terjadi. Kapasitas sungai yang semula lima meter kini hanya sekitar 2,5 meter. Akibatnya, saat hujan deras, air cepat meluap, apalagi jika ada sampah yang menyumbat aliran, banjir pasti tidak bisa dihindari," kata dia.

Adi Arnawa menjelaskan upaya penggerukan dan normalisasi aliran sungai yang dilakukan pemerintah juga sangat bergantung pada dukungan masyarakat.

Program itu dinilai tidak akan berhasil secara maksimal tanpa adanya partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan dan berhenti membuang sampah sembarangan.

"Oleh karena itu, saya mengajak dan mengimbau warga agar tidak membuang sampah sembarang ke sungai," jelas dia.

Pemkab Badung juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus melanjutkan program



Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa. ANTARA/HO-Pemkab Badung

TPS3R atau Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle agar pengelolaan sampah berjalan optimal.

"Mari bersama mewujudkan

Badung yang bersih, nyaman, serta lestari, demi kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pariwisata," pungkas Adi Arnawa. (adv)

Pemkab Badung Perkuat SDM dan Jaga Keberlanjutan Demografi



Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa (tengah). ANTARA/HO-Pemkab Badung

PEMKAB Badung, Bali, berkomitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menjaga keberlanjutan demografi Bali melalui program beasiswa.

Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa dalam keterangannya di Mangupura, Selasa, mengatakan program beasiswa penuh itu akan diberikan bagi mahasiswa dengan nama Nyoman (anak ketiga) dan Ketut (anak keempat) yang melanjutkan jenjang pendidikan S1 mulai tahun 2026.

"Program ini diharapkan mampu mendorong pemerataan akses pendidikan dan memperkuat keberlanjutan demografi Bali," ujar dia.

Ia menjelaskan berdasarkan hasil riset, jumlah keturunan Ketut di Bali terus menurun dan kini hanya sekitar empat persen dari populasi.

Menurut Adi Arnawa jika hal tersebut tidak diantisipasi,

kondisi itu bisa mempengaruhi keberlanjutan generasi di Pulau Dewata.

Ia memberikan contoh Jepang sebagai negara maju yang saat ini memberi insentif agar warganya memiliki anak karena jumlah penduduk usia produktif menurun drastis.

"Ini pelajaran berharga bagi kami. Budaya tetap ada, yang berubah adalah manusianya. Kami harus hati-hati menyikapi perubahan ini agar nilai luhur tetap lestari," jelas dia.

Ia menambahkan melalui program beasiswa itu Pemkab Badung berupaya agar akses terhadap pendidikan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat dan tidak ada yang tertinggal.

"Pemerintah tidak hanya mengurus infrastruktur, tetapi juga mendukung yadnya atau upacara agama, budaya, serta pendidikan generasi muda," pungkas Adi Arnawa. (adv)

Wabup Badung: Digitalisasi Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik

WAKIL Bupati Badung, Bali, Bagus Alit Sucipta mengatakan digitalisasi yang dilakukan di lingkup pemerintahan daerah akan meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Digitalisasi ini sangat mempermudah kelancaran serta meningkatkan kualitas pelayanan publik," ujar Wabup Bagus Alit Sucipta saat High Level Meeting (HLM) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) di Mangupura, Selasa.

Ia mengatakan digitalisasi merupakan langkah strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui terobosan dan inovasi transaksi digital yang dapat dirasakan langsung oleh pelaku usaha dan masyarakat.

"Untuk itu kami Pemkab Badung sangat mendukung

dan mendorong kinerja TP2DD dengan membangun budaya kerja yang profesional serta memperkuat koordinasi lintas instansi dan stakeholder," kata dia.

Wabup Bagus Alit Sucipta mengungkapkan pihaknya mengekspresikan seluruh pihak yang terlibat dalam pembahasan P2DD di Kabupaten Badung tersebut.

Menurut dia momentum ini menjadi wadah untuk mempererat kerja sama sekaligus memotivasi Tim P2DD Kabupaten Badung dalam upaya mempercepat dan memperluas implementasi digitalisasi daerah.

"Ini juga untuk menindaklanjuti arahan Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan



Wabup Bagus Alit Sucipta saat High Level Meeting (HLM) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) di Mangupura, Selasa (7/10). ANTARA/HO-Pemkab Badung

Digitalisasi Daerah," ungkap dia.

Ia menambahkan digitalisasi juga mendukung potensi penerimaan pajak dan retribusi yang besar di Kabupaten Badung yang juga akan membantu

mengoptimalkan pendapatan daerah.

"Hal ini dapat dicapai melalui sistem transaksi digital yang efisien, aman, dan akuntabel," pungkas Wabup Bagus Alit Sucipta. (adv)

Pemkab Badung-Kodim 1611/Badung Akselerasi Pembangunan Daerah



Bupati Wayan Adi Arnawa saat Pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa Ke-126 di wilayah Kodim 1611/Badung, bertempat di Lapangan Desa Taman, Kecamatan Abiansemal, Rabu (8/10). ANTARA/HO-Pemkab Badung

PEMKAB Badung, Bali mendukung kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-126 Tahun 2025 yang diselenggarakan di wilayah

Kodim 1611/Badung untuk mengakselerasi pembangunan daerah.

"TMMD merupakan karya bhakti nyata yang luar biasa

antara TNI, pemerintah, dan masyarakat dalam menggerakkan roda pembangunan," ujar Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa di Mangupura, Rabu.

Ia mengatakan sinergitis antara pemerintah daerah dengan TNI dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa pada kegiatan itu diwujudkan dalam pembangunan infrastruktur maupun non-fisik.

Kegiatan fisik yang dilakukan pada rangkaian TMMD itu di antaranya adalah pembukaan jalan Desa Bongkasa Pertiwi dengan panjang 1.070 meter dan lebar 3,5 meter, pembuatan saluran drainase dengan pemasangan dan urugan limestone, serta pemasangan paving.

Kegiatan lain yang dilakukan adalah bedah rumah dua unit, pembuatan MCK, pembuatan satu unit sumur bor di wilayah Bongkasa Pertiwi, penanaman pohon buah, penghijauan serta pembersihan Sungai Ayung, dan bantuan

100 paket nutrisi anak balita.

Kegiatan itu dilakukan dengan dukungan anggaran untuk Satgas TMMD sebesar Rp484 juta dan dukungan anggaran untuk pekerjaan, pengadaan material yang berasal dari APBD Badung sebesar Rp2,1 miliar lebih.

"Kami berharap hasil kegiatan ini dapat dirasakan manfaatnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan," kata dia.

Dandim 1611/Badung Kolonel Inf. Putu Tangkas Wirawan menjelaskan TMMD itu dilakukan dengan fokus kegiatan di wilayah Desa Bongkasa Pertiwi, Abiansemal, Badung.

"TMMD yang berlangsung selama 30 hari ini dilakukan dalam rangka membantu akselerasi pembangunan di daerah, mewujudkan rakyat yang tangguh dan meningkatkan kemanunggalan TNI dengan rakyat," jelas dia. (Adv)

Bunda PAUD Badung Kuatkan Peran Untuk Tingkatkan Kualitas Pendidikan

BUNDA PAUD Kabupaten Badung, Bali, Rasniathi Adi Arnawa menguatkan peran untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan mendukung program-program prioritas pada sektor pendidikan.

"Kami berupaya untuk dapat meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak usia dini di Kabupaten Badung dan Provinsi Bali guna mendukung program Indonesia Emas 2045," ujar Rasniathi Adi Arnawa di Mangupura, Kamis.

Ia mengatakan pihaknya mendukung program Wajib Belajar 13 Tahun, khususnya 1 tahun pra sekolah yang bertujuan memastikan setiap anak mengikuti pendidikan minimal satu tahun di jenjang PAUD sebelum memasuki sekolah dasar (SD).

"Program itu diharapkan dapat meningkatkan kesiapan belajar anak, baik secara kognitif, sosial-emosional, maupun motorik," katanya.

Rasniathi Adi Arnawa menjelaskan tersedianya pendidikan yang mudah diakses dan berkualitas akan meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak usia dini di wilayah Indonesia.

Untuk itu Bunda PAUD akan terus berperan aktif dalam meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Provinsi Bali.

"Bunda PAUD memiliki peran strategis dalam mengadvokasi, mensosialisasikan, dan membina penyelenggaraan layanan PAUD yang bermutu dan inklusif," jelasnya.

Ia menambahkan pihaknya bersama dengan jajaran pemerintah daerah setempat



Bunda PAUD Kabupaten Badung, Bali, Rasniathi Adi Arnawa (ketiga kiri). ANTARA/HO-Pemkab Badung

juga akan terus berkomitmen dalam mewujudkan PAUD yang bermutu dan berkualitas.

"Mari menjadikan PAUD sebagai program prioritas

dalam pembangunan di bidang pendidikan dengan terobosan-terobosan sesuai dengan perkembangan jaman," pungkasnya. **(adv)**

Pemkab Bangli Minta BKSDA Bongkar Bangunan di TWA Penelokan



Pemerintah Kabupaten Bangli, Bali mengadakan rapat koordinasi terkait berdirinya bangunan restoran diperkirakan menyalahi izin di kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Penelokan, Bangli, Senin (13/10/2025). ANTARA/HO-Pemkab Bangli

PEMERINTAH Kabupaten Bangli, Bali, meminta Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam (BKSDA) Bali agar memerintahkan kepada salah satu pengusaha untuk membongkar bangunan/restoran di kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Penelokan (Suter), Bangli.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bangli Jetet Hiberon dalam keterangan yang dikonfirmasi di Denpasar, Senin, menjelaskan keputusan itu berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dia pimpin bersama instansi

terkait teknis lainnya.

Desakan untuk membongkar bangunan itu dikeluarkan setelah ditemukan ketidaksesuaian antara kegiatan pembangunan dengan persetujuan perizinan berusaha.

Adapun perizinan yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yakni perizinan berusaha penyediaan jasa wisata alam di kawasan konservasi dengan jenis kegiatan penyediaan jasa makanan dan minuman wisata alam.

Hak pemegang sertifikat standar hanya boleh memanfaatkan fasilitas pariwisata alam yang merupakan milik negara sesuai ketentuan perundang-undangan dan perizinan tersebut tidak memberikan izin untuk pembangunan gedung/bangunan.

Sementara itu, Kepala BKSDA Bali Ratna Hendratmoko dalam kesempatan terpisah menjelaskan pihaknya menyiapkan alternatif jalan

tengah yakni melalui mekanisme penyelesaian kerja sama hibah.

Dalam skema itu, bangunan yang terlanjur berdiri dan belum memiliki legalitas akan ditempuh melalui proses hibah kepada negara sehingga statusnya dapat ditetapkan sebagai Barang Milik Negara (BMN).

"Selanjutnya, BKSDA Bali akan menentukan nilai sewa mendasarkan pada nilai kewajiban, yang kemudian menjadi dasar dalam pelaksanaan penyewaan aset negara secara sah dan transparan," ucapnya.

Menurut dia, langkah itu sesuai ketentuan Pasal 51 huruf d Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8/MENLHK/SETJEN/KSA.3/3/2019, yang memberikan hak kepada pemegang izin usaha pariwisata alam untuk memanfaatkan fasilitas pariwisata alam milik negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. **(ant)**

BPBD Serahkan Donasi ASN dan Masyarakat ke Korban Banjir Klungkung

BPBD Bali menyerahkan dana donasi gotong royong ASN Pemprov Bali dan masyarakat melalui Dompet Peduli Bencana ke korban banjir besar akibat cuaca ekstrem September lalu di Kabupaten Klungkung.

Kepala Pelaksana BPBD Bali I Gede Agung Teja Bhusana Yadnya dalam keterangan di Denpasar, Sabtu, menyebut total donasi yang diserahkan sebanyak Rp533,6 juta.

"Bantuan tersebut bersumber dari sumbangan masyarakat luas dan dana gotong royong ASN Pemprov Bali, ini merupakan wujud solidaritas kemanusiaan," kata Kalaksa BPBD Bali itu.

Adapun bantuan donasi diserahkan kepada 22 warga pemilik rumah yang rusak sedang dan berat, pengelola empat tempat ibadah, serta sejumlah pelaku usaha dan nelayan yang turut terdampak bencana.

Setelah ramai-ramai protes soal pungutan donasi dari ASN,

Gede Teja menyampaikan bahwa uang yang terkumpul dari gotong royong tersebut hingga saat ini sudah disalurkan selain ke Klungkung juga ke korban di Denpasar, Tabanan, dan Jembrana.

Ia justru mengapresiasi BPBD di daerah yang cepat mendata dan melaporkan kondisi di daerah sehingga dapat segera disalurkan bantuan melalui Pemprov Bali.

"BPBD Klungkung ini luar biasa, mereka sigap turun ke lapangan, cepat melakukan pendataan, dan menyampaikan laporan secara akurat, tanpa data yang lengkap kami tidak bisa menyalurkan bantuan secara tepat sasaran," ujar Gede Teja.

Dalam penyerahan bantuan donasi itu, BPBD Bali sekaligus memberi penegasan soal pentingnya mitigasi bencana di tengah fenomena cuaca yang tidak menentu, bahkan memicu banjir besar di luar musim hujan.

"Untuk antisipasi ke depan,



Kalaksa BPBD Bali Gede Agung Teja Bhusana serahkan bantuan donasi dari ASN dan masyarakat ke warga Kabupaten Klungkung, Denpasar, Sabtu 11/10/2025. ANTARA/ho-Pemprov Bali

mari kita bersihkan saluran got di depan rumah, gang, maupun jalur sungai agar saat hujan deras, air dapat mengalir lancar dan tidak menimbulkan banjir," kata dia.

Bupati Klungkung I Made Sastra yang turut hadir menambahkan bahwa bencana akibat cuaca ekstrem pada September lalu itu melanda hampir seluruh wilayah

di Kabupaten Klungkung.

"Curah hujan yang tinggi selama beberapa hari menyebabkan banjir di sejumlah titik, dan yang paling parah terjadi di Banjar Pancingan, Desa Kusamba, sebanyak 124 kepala keluarga harus mengungsi ke balai banjar atau rumah kerabat terdekat," ujarnya. (ant)

Pekerja Migran Jembrana Mulai Manfaatkan Subsidi Kredit Bank



Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan saat melepas keberangkatan dua pekerja migran asal kabupaten Jembrana di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, Kamis (9/10/2025). ANTARA/HO-Humas Pemkab Jembrana

PEKERJA migran asal Kabupaten Jembrana, Bali mulai memanfaatkan subsidi bunga kredit bank sebagai modal keberangkatan, yang merupakan program pemerintah kabupaten setempat.

"Selain subsidi terhadap bunga kredit, kami juga fasilitasi pekerja migran agar bisa mengakses pembiayaan dari bank," kata Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan saat melepas keberang-

katan dua pekerja migran asal kabupaten tersebut di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, Kamis.

Dia mengatakan, bagi pekerja migran sektor apa saja termasuk yang bekerja di laut, pihaknya memberikan subsidi dengan membayar penuh bunga bank pinjaman mereka.

Subsidi bunga bagi pekerja migran pemula ini, kata dia, untuk nilai pinjaman antara Rp50 juta hingga Rp100 juta dengan masa pelunasan 12 bulan.

"Setelah mendapatkan kontrak kerja, pekerja migran bisa mengajukan subsidi bunga pinjaman kredit itu ke Pemkab Jembrana," katanya.

Menurut dia, program ini untuk mengatasi persoalan yang sering terjadi pada masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri terkait biaya keberangkatan.

"Banyak anak muda Jembrana

punya keinginan besar untuk bekerja di luar negeri, namun kendala utama selalu soal biaya dan bunga pinjaman yang tinggi. Kami hadirkan program ini agar mereka bisa berangkat dengan tenang, tanpa terbebani utang yang mencikik," katanya.

Karena sudah ada kedulian pemerintah ini, dia minta masyarakat Jembrana memanfaatkannya sehingga tidak ada pekerja migran ilegal dari daerah ini.

"Berangkatlah bekerja di luar negeri sesuai prosedur dan aturan. Kami Pemerintah Kabupaten Jembrana selalu siap mendampingi dan memberikan dukungan kapanpun dibutuhkan," katanya.

Kepala Bidang Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Jembrana Putu Agus Arimbawa mengatakan, pihaknya menargetkan hingga akhir tahun sebanyak 50 orang pekerja migran memanfaatkan program ini. (ant)

Dua Kesenian Buleleng Ditetapkan Sebagai Warisan Budaya Takbenda

SEBANYAK dua seni khas Kabupaten Buleleng, Bali yakni Tari Baris Bedug asal Kelurahan Banyuning dan Karya Alilitan dari Masyarakat Empat Desa (Gobleg, Munduk, Gesing, dan Umejero) ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia oleh Kementerian Kebudayaan.

"Rasa syukur dan bangga atas penetapan dua warisan budaya. Ini adalah perjuangan banyak pihak demi tercapainya WBTb," kata Kepala Dinas Kebudayaan Buleleng Nyoman Wisandika di Buleleng, Bali, Senin.

Ia menjelaskan proses pengusulan dua seni tersebut untuk meraih WBTb cukup panjang, dimulai sejak akhir 2024 lalu melalui tahapan verifikasi, pelengkapan narasumber, hingga sidang penetapan di Kementerian Kebudayaan.

Menurut Wisandika, kedua tradisi ini dinilai memiliki keunikan dan ciri khas lokal yang

tidak dimiliki daerah lain, menjadi alasan kuat penetapannya sebagai WBTb.

Tari Baris Bedug Buleleng misalnya memiliki keunikan pada bungkuk atau puntalan kain di punggung penari yang menggambarkan simbol tertentu dalam upacara ngaben.

Tarian ini biasanya dibawakan oleh empat penari pada prosesi tedun sawe dan pelepasan tali peti.

Sementara itu, Karya Alilitan merupakan tradisi khas dari empat desa di kawasan Catur Desa (Gobleg, Munduk, Gesing, dan Umejero) yang diwariskan secara turun-temurun dan masih lestari hingga kini.

"Penetapan WBTb tidak bisa diberikan pada tradisi yang sudah punah atau tidak lagi dilaksanakan. Dua tradisi ini masih bertahan, masih hidup di tengah masyarakat, dan terus dilaksanakan secara berkelanjutan," kata Wisandika.



Warisan tradisi Karya Alilitan di Masyarakat Empat Desa di Kabupaten Buleleng, Bali. ANTARA/HO-Kominfosantik Buleleng

Dengan dua tambahan ini, jumlah WBTb yang dimiliki Kabupaten Buleleng kini mencapai 18 unsur budaya.

Dinas Kebudayaan pun terus berkomitmen mengajukan unsur budaya lain untuk ditetapkan sebagai WBTb maupun Cagar

Budaya.

"Setiap tahun kami mengusulkan baik permainan tradisional, ritus, maupun karya budaya lainnya. Tahun ini, satu Cagar Budaya yaitu Gereja Pantekosta juga sudah hampir rampung menunggu SK Bupati," ujarnya. (ant)

Operator Tegaskan Bus TMD Bukan Pesaing Sopir Pariwisata di Bali



Dokumentasi penumpang menaiki transportasi publik Bus TMD rute Terminal Ubung-Bandara I Gusti Ngurah Rai, Denpasar, Bali. (ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari)

OPERATOR Bus Trans Metro Dewata (TMD) menegaskan bahwa transportasi publik itu bukanlah pesaing pelaku usaha lokal seperti sopir pariwisata di Bali.

Hal ini disampaikan Manager Trans Metro Dewata Ida Bagus Eka Budi di Denpasar, Kamis, merespons usulan Fraksi

Demokrat-Nasdem DPRD Bali yang ingin rute Bandara I Gusti Ngurah Rai dihentikan karena kebanyakan dimanfaatkan wisatawan dan rute Monkey Forest yang diklaim sepi pemintat.

"Kami tidak mendata jumlah pengguna dari sisi wisatawan, seharusnya jika mereka (DPRD) tahu konsep layanan, Bus TMD

bukanlah pesaing pelaku usaha transportasi pariwisata," kata dia.

"Di Indonesia tidak ada regulasi yang membedakan tarif bagi masyarakat dan wisatawan pada angkutan massal perkotaan, sehingga siapa saja bisa naik tanpa dibedakan," sambungnya.

Rute dari dan ke Bandara I Gusti Ngurah Rai sendiri merupakan salah satu rute yang tinggi penggunanya, tak hanya wisatawan, masyarakat Bali pengguna bandara juga memanfaatkan transportasi publik bertarif Rp4.400 itu sehari-hari.

Begitu pula rute Monkey Forest, Eka Budi menegaskan banyak masyarakat maupun wisatawan yang memanfaatkan rute tersebut terutama akhir pekan sehingga penumpang selalu melonjak di hari Sabtu dan Minggu.

"Koridor II dari dan menuju Bandara I Gusti Ngurah Rai

selama September 2025 saja penumpangnya 31.112 orang, hampir setara rute Terminal Pesiapan dan Politeknik Negeri Bali atau rute kampus," ujarnya.

Operator Bus TMD menegasikan artinya dalam sehari rata-rata 1.000 penumpang menggunakan layanan ini, sehingga jika dihentikan akan terdampak bagi mereka.

Begitu pula dengan rute Monkey Forest, dimana selama September saja sebanyak 23.450 penumpang memanfaatkan bus atau rata-rata 781 penumpang harian.

"Rata-rata harian seluruh koridor 4.500 penumpang, untuk rute bandara dua bulan terakhir sudah stabil penumpangnya harian 1.000 orang tiap hari, sedangkan Monkey Forest Ubud tiap akhir pekan lebih tinggi bisa 900 orang tiap akhir pekan," kata Eka Budi. (ant)